



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

*Jalan Raya Lebong Arga Makmur, TUBEI*



**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN LEBONG**  
**NOMOR        TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KINERJA TAHUNAN PADA SATUAN POLISI PAMONG**  
**PRAJA KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN LEBONG**

- Menimbang    : a. bahwa untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan target kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong, maka perlu menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong tentang Rencana Kinerja Tahunan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat    : a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan pelaksanaan Pemerintah Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2854);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- l. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebong Tahun 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2016-2021;
- n. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- o. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
Pertama : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan (RKT) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebong ini.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tubei  
Pada tanggal : 2019





**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	RENCANA ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Surat Resmi Masuk dan Keluar	700 surat	65.000.000
	Penyediaan jasa sumber daya air dan listrik	Biaya Listrik, Biaya Internet	12 Bulan	20.000.000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kend. Dinas/operasional	Perpanjangan STNK, Biaya Jasa Servis, Biaya Penggantian Suku Cadang, Biaya Bahan Bakar Minyak	12 Bulan	160.000.000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium PNS Pengelola Keuangan	108 Orang	1.300.000.000
		Honorarium Banpol PP dan PBK	1692 Orang	1.300.000.000
		Honorarium Sopir dan Penjaga Kantor	12 Bulan	1.300.000.000
		Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubakti	48 Orang	1.300.000.000
		Honorarium Operator Aplikasi SIMDA	12 Orang	1.300.000.000
	Biaya Premi Asuransi Ketenagakerjaan	1 Tahun	1.300.000.000	
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja Yang Baik	12 Bulan	75.000.000
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor (ATK)	12 Bulan	80.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Biaya Spanduk, Cetak, Photo Copy	12 Bulan	50.000.000
	Penyediaan Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Biaya Alat Listrik dan Elektronik, CCTV, Handy Talky	12 Bulan	75.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat dan Bahan Pembersih	12 Bulan	25.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	75.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Biaya Makanan dan Minuman Harian	12 Bulan	150.000.000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan Dinas ke luar daerah.	12 Bulan	230.000.000	
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana</b>	Pengadaan Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan Kepala Dinas	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan PATWAL	-	-
		Jumlah Kendaraan Penegak Peraturan Perundang-undangan	1 unit	400.000.000
		Jumlah Kendaraan Operasional DALMAS	-	-
		Jumlah Kendaraan Operasional DAMKAR	2 unit	4.200.000.000
Jumlah Kendaraan Operasional Roda 2	4 unit	100.000.000		

<b>Aparatur</b>	Rehabilitasi sedang/berat Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Optimal	1 Keg	200.000.000
	Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	Jumlah Bangunan Gedung dan Aula Kantor	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional	Optimalisasi Mobil Damkar	-	-
	Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Bangunan Gedung Garasi/Pool Mobil Damkar	-	-
	Pengadaan Meubeler	Jumlah Pelayanan Prima	60 unit	145.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	15 unit	100.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	1 Paket	225.000.000
	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Absensi Elektornik	6 unit	6.000.000
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas PDH SATPOL PP	150 stel	120.000.000
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Dinas PDL BANPOL SATPOL PP	150 stel	700.000.000
		Jumlah Pakaian Dinas Anggota LINMAS	90 stel	700.000.000
		Jumlah Pakaian Dinas PDL DAMKAR	-	700.000.000
	Jumlah Pakaian Dinas Khusus Penegak Peraturan Perundang-undangan	-	700.000.000	
	Pengadaan Pakaian Korpri	Jumlah Pakaian Korpri	-	-
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Pakaian Olah Raga	150 stel	155.000.000	
	Jumlah Pakaian Batik	150 stel	155.000.000	
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Aparatur yang mengikut Diklat PPNS dan Diksar Samapta	5 Orang	150.000.000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Sosialisasi Penegakan Undang-Undang	2 Kali	800.000.000
		Jumlah Sosialisasi Undang-Undang atau peraturan lainnya Bidang LINMAS	2 Kali	800.000.000
		Jumlah Sosialisasi Undang-Undang atau peraturan lainnya Bidang DAMKAR	2 Kali	800.000.000
		Jumlah Sosialisasi Undang-Undang atau peraturan lainnya Bidang Trantibum	2 Kali	800.000.000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti BIMTEK	5 Orang	150.000.000
<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Petugas Jaga	720 Orang	360.000.000
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Laporan Tim Yustisi Kabupaten	4 Laporan	75.000.000
	Pembangunan Pos Jaga/Ronda	Jumlah Gedung/pos jaga DAMKAR Kecamatan	2 Unit	1.700.000.000
		Jumlah Pos Jaga Satpol-PP	2 Unit	1.700.000.000
	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Anggota BANPOL SATPOL PP dan Anggota LINMAS yang dilatih	100 Orang	400.000.000
	Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah Penjagaan Keamanan Lingkungan	3 Keg	300.000.000
Pengendalian Kebisingan dan gangguan dari kegiatan Masyarakat	Jumlah Operasi Penertiban	84 kali	420.000.000	

<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan</b>	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen TEPPRA OPD	1 Dokumen	7.500.000
	Penyusunan Rencana Kerja, Lakip dan Rencana Strategis SKPD	Dokumen TEPPRA OPD	2 Dokumen	7.500.000
	Penyusunan Pelaporan Aset OPD	Dokumen Aset	1 Dokumen	7.500.000
	Penyusunan Standar Operasional Prosedur/SOP Pelayanan SKPD	Dokumen SOP	1 Dokumen	7.500.000
<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah Pelaksanaan Hari-hari Besar Nasional	12 Bulan	350.000.000
		Jumlah HUT SATPOL PP dan HUT Damkar Kab. Lebong, Propinsi, Nasional	6 Kali	350.000.000
<b>Program Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja	Dokumen Monev	12 Bulan	300.000.000
	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Patroli Lingkungan	24 Kali	240.000.000
	Kerjasama Pengembangan Kemampuan aparat POL PP dengan TNI, POLRI dan KEJAKSAAN	Jumlah Dokumen Berkas Perkara	20 Dok	100.000.000
	Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Jumlah Personil yang tersertifikasi	30 Orang	250.000.000
<b>Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)</b>	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan MIRAS dan NARKOBA	Jumlah Operasi Penertiban	12 Kali	60.000.000
	Penyuluhan Pencegahan berkembangnya Praktek Prostitusi	Jumlah Operasi Penertiban	12 Kali	60.000.000
	Penyuluhan/Pencegahan berkembangnya Praktek Perjudian	Jumlah Operasi Penertiban	12 Kali	60.000.000
	Penyuluhan Pencegahan dan Penertiban Aksi Premanisme	Jumlah Operasi Penertiban	12 Kali	60.000.000

<b>Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan</b>	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Jumlah satuan linmas yang profesional	4 Keg	480.000.000
<b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>	Penyusunan norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Dokumen norma, standar, pedoman, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran	1 DOK	50.000.000
	Sosialisasi norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Sosialisasi norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran	2 Keg	200.000.000
	Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran	Jumlah Pemeriksaan dan pengawasan bangunan/gedung dalam hal alat proteksi kebakaran	1 Dok	50.000.000
	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan/Pencegahan Kebakaran	Jumlah diklat bagi aparaturnya pemadam kebakaran	75%	100.000.000
	Kegiatan rekrutmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran	Jumlah penyuluhan bagi anggota satwankar di setiap Desa/Kelurahan	25 Orang	15.000.000
	Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran	Jumlah Penyuluhan dan bimbingan teknis bagi Masyarakat	4 Lokasi	300.000.000
	Pengadaan sarana dan prasarana Pencegahan bahaya Kebakaran	Jumlah Kendaraan pemadam kebakaran/Rescue serta peralatan pendukung lainnya	2 Unit	4.200.000.000
	Rehabilitasi sarana dan prasarana Pencegahan bahaya Kebakaran	Jumlah rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran	-	-
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran/Rescue serta peralatan pendukung lainnya	12 Bulan	350.000.000
	Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran	Persentase pelayanan evakuasi akibat kebakaran dan bencana	5 Kali	100.000.000
Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran	Persentase pelayanan penanggulangan kebakaran	25 Menit	250.000.000	
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>33.821.000.000</b>


  
**KEPALA**  
**ZAINAL HUSNI, SH. MM**  
**Pembina TK.1/IVb NIP. 19650924 198703 1 004**